

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA MODAL DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

ANALYSIS OF VILLAGE OWN SOURCE REVENUE, VILLAGE FUNDS, VILLAGE FUND ALLOCATION, AND PROFIT SHARING TAX AND RETRIBUTION ON CAPITAL EXPENDITURES IN WONOGIRI DISTRICT IN 2017

¹⁾Heppy Purbasari, ²⁾Dewita Puspawati, ³⁾Susi Lestari, ⁴⁾Ketut Pratiwi

^{1,2,3,4)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos, Pabelan, Kartasura

*Email: hp123@ums.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak baru dalam reformasi desa. Dengan diberlakukannya UU No.6 tahun 2014 diharapkan masyarakat desa lebih dapat mencapai kemandirian desa. Penelitian ini memiliki tujuan khusus bahwa UU No.6 baru dijalankan, maka peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai APBDesa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri, sedangkan purposive sampling digunakan sebagai metode sampel dengan sampel yang digunakan adalah Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016. Berdasarkan kriteria yang diajukan peneliti, sampel yang diperoleh sebesar 231 Desa. Sampel yang diperoleh kemudian di olah dengan menggunakan analisis regresi berganda, dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh hasil bahwa hanya PADes dan ADD yang dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Sedangkan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Belanja Modal Desa.

ABSTRACT

The Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a new milestone in village reform. With the enactment of Law No.6 of 2014, it is expected that villagers will be more able to achieve village independence. This research has a specific purpose that Law No.6 has just been implemented, so researchers want to explore more deeply about Village Revenue and Expenditure Budget. The population used in this study is the existing village in Wonogiri Regency in 2016. The sample obtained was 231 villages. Data is processed using multiple regression analysis. The results show that only PADes and ADD can affect the Village Capital Expenditures. Whereas Village Funds and Tax and Retribution Revenue Proven proved to have no significant effect on Village Capital Expenditures.

Keywords : Village Own Source Revenue, Village Fund, Village Fund Allocation, Profit Sharing Tax and Revenue, Village Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak baru reformasi Desa. Desa sebagai bagian dari level pemerintahan di Indonesia sebenarnya telah mengalami beberapa fase perkembangan status sejak UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan yang sangat sentralistik, hingga sedikit demi sedikit mendapatkan otonomi dengan turunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa hingga yang terakhir pengakuan dan

pemberian otonomi yang lebih besar dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal sebagai Kemandirian Desa (Sutoro Eko, 2014).

Kemandirian desa ditekankan sebagai pengganti konsep otonomi desa, dikarenakan otonomi desa mengesankan desa hanya identik dengan daerah otonom tingkat tiga setelah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sehingga konsep otonomi desa yang sudah tidak dikenal oleh peraturan perundangan yang baru Kemandirian Desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya.

Dengan status dan aturan perundangan yang baru tersebut, Desa didorong untuk lebih mandiri sesuai dengan semangat kemandirian Desa. Akan tetapi, sebagai bagian dari suksesnya kemandirian Desa. Desa mendapatkan lebih banyak dana transfer baik dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD), bantuan provinsi, maupun juga Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota yang pada fungsinya digunakan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sesuai dengan kewenangan dan potensinya sehingga merubah struktur dan model Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APBDes (Alfatta Akbar dan Agus Prastyawan, 2016).

Berdasarkan peraturan perundangan yang baru APBDesa yang merupakan rencana keuangan yang dibuat setiap tahun. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa merupakan hasil desa yang tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan Desa yang terdiri dari (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) diperoleh dari pengembangan sumber daya desa, misalnya pengelolaan tanah kas desa, (2) transfer dan (3) pendapatan lain-lain (Permendagri No 113 tahun 2016).

Perubahan model dan struktur APBDesa sekaligus perubahan posisi keuangan yang ada di Desa dengan turunnya peraturan perundangan yang baru, menjadikan riset dan penelitian yang menjadikan Desa sebagai obyeknya merupakan sebuah tantangan dikarenakan sebagai sebuah hal baru, belum banyak riset tentang desa, khususnya tentang pengelolaan keuangan di Desa.

Beberapa penelitian dalam pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Ummu Habibah dan Bawono (2016) terkait dengan pengaruh PADesa, DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan, serta Yuni Eka Putri dan Bawono (2016) yang terkait dengan pengaruh PADesa, DD, ADD dan BHP terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan, dua penelitian tersebut menggunakan obyek penelitian di Desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo memperlihatkan variasi pengaruh dari sisi pendapatan pada belanja desa dengan memunculkan hasil bahwa secara signifikan, hanya DD yang mempengaruhi Belanja Desa bidang Pendidikan sedangkan Belanja Desa di bidang Kesehatan mendapatkan pengaruh yang signifikan dari besaran PADesa.

Disisi lain, di tingkat daerah khususnya di level pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), penelitian tentang pengaruh Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan seterusnya) terhadap belanja modal sangatlah banyak. Sehingga perlu untuk diteliti kembali dalam level pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang masih minimnya riset dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan hasil-hasil penelitian sebelumnya baik ditingkat daerah maupun desa, peneliti bermaksud menyusun sebuah riset tentang Pengaruh PADesa, DD, ADD dan BHPR terhadap Belanja Modal di Desa. Peneliti tertarik untuk meneliti PADesa, DD, ADD dan BHPR terhadap Belanja Modal di Desa karena komponen dari APBDes adalah penerimaan dan belanja, dimana penerimaan diturunkan menjadi PADesa, Transfer dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja diturunkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. PADesa merupakan pendapatan asli yang diterima oleh desa, sedangkan DD, ADD dan BHPR merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah, dan belanja modal merupakan belanja untuk membiayai pengadaan barang yang dapat dipergunakan lebih dari 12 tahun.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai untuk menguji pengaruh antara Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD),

Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012: 115). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 251 desa dan 43 kelurahan.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 116). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 61). Kriteria yang diajukan dalam pemilihan sampel adalah Desa di Kabupaten Wonogiri yang telah mengumpulkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sampai pada bulan Agustus 2017.

Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja desa bidang modal desa. Pengukuran variabel bebas dan terikat berasal dari angka realisasi belanja modal pada bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017.

Pengujian Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh pendapatn asli desa (PADes), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap belanja modal di desa (BMD). Pengujian hipotesis dilakukan dengan persamaan sebagai berikut.

$$BMD = \beta_0 + \beta_1 PADes + \beta_2 DD + \beta_3 ADD + \beta_4 BHPR + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, dari 251 Desa dan 43 Kelurahan, hanya 231 Desa yang mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai bulan Agustus 2017. Sehingga, sampel yang peneliti gunakan hannya 231 desa di Kabupaten Wonogiri tahun 2017.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengolahan regresi berganda. Dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian Regresi Berganda

Keterangan	β	t hitung	Signifikansi	Kesimpulan
PADes	3,149	5,855	0,000	H ₁ Didukung
DD	0,332	0,923	0,357	H ₂ Tidak terdukung
ADD	3,685	4,678	0,000	H ₃ Didukung
BHPR	3,687	0,950	0,343	H ₄ Tidak terdukung
F Hitung	17,324	Sign F	0,000	Model Fit
Adj R²	22,1%			

Dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh hasil bahwa Adj R^2 sebesar 22,1% yang berarti variabel PADes, DD, BHPR, ADD dapat menjelaskan Belanja Modal sebesar 22,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain, misalnya seperti jumlah panjang jalan yang dimiliki desa, luas wilayah, jumlah irigasi dan lain sebagainya. Selain itu dari hasil pengujian model dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini memiliki model yang *fit* karena memiliki nilai F hitung sebesar 17,324 dengan sign 0,000, dimana sign $< 0,05$. Sedangkan untuk pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa dari empat hipotesis yang diajukan hanya dua hipotesis yang dapat diterima yaitu H_1 dan H_3 , dimana H_1 berarti variabel PADes berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa dan H_3 berarti ADD berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa.

H_1 : Pendapatan Asli Desa (PADes) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa.

Berdasarkan pengujian regresi berganda yang memiliki hasil bahwa PADes dapat berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal dengan nilai t hitung 5,855 dan sign 0,000 $< 0,05$ yang berarti H_1 didukung bahwa PADes mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa desa-desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah menggunakan dana PADes untuk keperluan menambah pembelian aset tetap desa, pembangunan atau rehabilitasi aset tetap desa dan aset-aset tetap lainnya yang memiliki kriteria kapitalisasi. Sebagai misal, Desa Jaten yang memiliki PADes sebesar Rp 261.000.000, ditemukan dalam APBDes menggunakan lebih dari 50% PADesnya untuk alokasi Belanja Modal. Adapun mayoritas Belanja Modal tersebut ditemukan pada Belanja Bidang Pembangunan. Penelitian untuk tingkat Desa masih jarang dilakukan, sehingga jika kita lihat di tingkat Kabupaten dan Kota, penelitian ini sejalan dengan Sularno (2013) yang menyatakan bahwa PADes berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

H_2 : Dana Desa (DD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa.

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diperoleh bahwa DD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa dengan nilai t hitung 0,923 dan sign 0,357 $> 0,05$, hal ini disebabkan karena pengalokasian DD oleh Pemerintah Pusat untuk Tahun 2017 (PMK 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa), masih menggunakan rumus jumlah dana desa yang berasal dari alokasi dasar ditambah alokasi formula di mana alokasi dasar DD (sebesar 90%) berjumlah sama tiap desa. Sehingga varian DD tidak sejalan dengan varian Belanja Modal di tiap Desa.

H_3 : Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa.

Sesuai dengan hasil uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa ADD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa yang memiliki nilai t hitung 4,678 dengan sign 0,000, hal ini dapat dijelaskan karena ADD merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk membantu PADes dalam memenuhi kebutuhan Belanja Modal Desa, walaupun ADD diprioritaskan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, misalnya seperti penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta untuk memenuhi belanja operasional desa. Di sisi lain ADD juga memiliki tujuan dan digunakan untuk menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, dimana peningkatan tersebut cenderung digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur. ADD dan DD merupakan dana yang bersumber dari pendapatan transfer, jika kita lihat penelitian di tingkat Kabupaten/kota, ADD dan DD memiliki konsep yang sama dengan DAU dan DAK karena sumber dananya berasal dari dana transfer. Di tingkat Kabupaten/Kota penelitian ini sejalan dengan Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Indonesia. Berbeda dengan pendapat Handayani dan Nuraina (2012) yang meneliti dana transfer hanya dari sisi DAK, hasilnya DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dikarenakan DAK yang diberikan dari Pemerintah Pusat memiliki sifat prioritas nasional, dan apabila

Kabupaten/Kota yang menerima DAK maka wajib memberikan sekurang-kurangnya 10% dari total DAK untuk pendampingan kegiatan fisik.

H₄: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa.

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat diketahui bahwa BHPR tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung 0,950 dengan sign 0,343. Sebagaimana DD, alokasi BHPR di Kabupaten Wonogiri untuk tiap Desa cenderung sama, karena menggunakan formula yang relatif sama dengan model DD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian BHPR tidak sejalan dengan varian belanja Modal yang mengakibatkan BHPR tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik kepada Belanja Modal. Sedangkan di tingkat Kabupaten/kota penelitian ini sesuai dengan Handayani dan Nuraina, (2012) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara positif terhadap alokasi Belanja Modal di Kabupaten Madiun karena Pajak Daerah merupakan komponen terbesar di dalam Pendapatan Asli Daerah

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti terkait pengaruh PADes, DD, ADD dan BHPR terhadap Belanja Modal Desa. Berdasarkan uraian teori dan hasil pengujian data, dapat disimpulkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa PADes memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa, hal ini dapat terjadi karena desa-desa di Kabupaten Wonogiri menggunakan sumber dana PADes untuk keperluan penambahan aset desa, pembangunan atau rehabilitasi aset tetap desa dan aset-aset tetap lainnya yang memiliki kriteria kapitalisasi. Sedangkan, DD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa, karena berdasarkan PMK 49 tahun 2016 dimana rumus alokasi DD di tiap desa sebesar 90%, sehingga DD di setiap desa memiliki jumlah yang hampir sama, sehingga varian DD tidak sejalan dengan varian Belanja Modal di tiap-tiap Desa. Variabel ADD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Desa, hal ini terjadi karena ADD merupakan salah satu komponen dari PADes yang memiliki tujuan untuk menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, walaupun prioritas ADD digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintah Desa. Hasil berkebalikan dengan variabel BHPR yang tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa, hal ini terjadi karena alokasi BHPR di Kabupaten Wonogiri untuk tiap Desa cenderung sama, karena menggunakan formula yang relatif sama dengan model DD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian BHPR tidak sejalan dengan varian belanja Modal yang mengakibatkan BHPR tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik kepada Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Agus. 2015. "Pola Hubungan Pemerintah Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance". ISSN: 2302-2752, Volume 4 No. 3 Tahun 2015
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Madiun. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol 1 No1 Oktober 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sularno, Fitria Mwgawati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Google Schoolar.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 1 No 2 Juli 2008. Hal 142-155.

-
- Ummu Habibah, ADB Bawono, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa bidang Pendidikan (Studi Empiris di desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuni Eka Putri, ADB Bawono, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa bidang Kesehatan (Studi Empiris di desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo).